

PROPOSAL PENELITIAN

PERBANDINGAN DINAMIKA KONFLIK DOMESTIK DI ASIA TENGGARA: STUDI KASUS: INDONESIA, MALAYSIA DAN THAILAND



OLEH:

**DENIK ISWARDANI WITARTI, Ph. D
TUBAGUS ERIF FATHURROHMAN, SIP, MIP, M.Si
TULUS YUNIASIH, M.Soc.Sc.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA
2011**

Kepada :

Yth. Direktur LPPM Universitas Budi Luhur

Bp. Ir. Nazori AZ, MT

Di tempat

Bersama ini, perkenankan kami mengajukan proposal penelitian ;

Judul Penelitian	: Perbandingan Dinamika Konflik Domestik di Asia Tenggara. Studi Kasus Indonesia, Malaysia dan Thailand
Jangka Penelitian	: 6 bulan

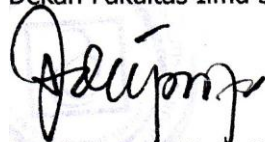
Atas perhatian dan bantuannya, disampaikan terima kasih.

Jakarta, 12 Oktober 2011

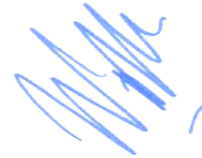
Mengetahui,

Ketua Peneliti,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Rusdiyanta, S.IP, M.Si



Denik Iswardani Witarti, Ph.D

PERBANDINGAN DINAMIKA KONFLIK DOMESTIK DI ASIA TENGGARA: STUDI KASUS: INDONESIA, MALAYSIA DAN THAILAND

BAB 1. PENDAHULUAN

Studi konflik sejak awal perkembangannya merupakan salah satu subdisiplin yang terus dan paling berkembang dalam literatur ilmu hubungan internasional kontemporer. Hal ini tentu saja berakar dari kealamian ilmu hubungan internasional yang senantiasa diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan antar negara. Faktor utama lain berasal dari perluasan dan semakin rumitnya ruang lingkup dinamika konflik internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan negarawan, beserta fenomena globalisasi dan regionalisme yang seringkali menjadi kendaraan perluasan dan kerumitan tersebut.¹ Batas-batas negara yang semakin kabur memperdalam pengaruh berbagai aspek yang pada masa perang kurang dipertimbangkan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan konflik domestik di sebuah negara, terhadap konflik—dan tentu saja terhadap hubungan—internasional.

Di Asia Tenggara, seperti halnya di kawasan lain di dunia, signifikansi konflik domestik dalam sejarah dunia dapat ditelusuri sejak pasca Perang Dunia Kedua hingga kini. Selain langsung menjadi ciri khas dinamika politik negara-negara post-kolonialisme, konflik domestik mendominasi tidak hanya jumlah konflik yang berlaku tetapi juga mendominasi pengaruh terhadap kestabilan politik negara terkait bahkan terhadap

¹ Dinamika konflik secara sistematis disusun oleh Paul Wehr sebagai salah satu elemen dalam peta konflik. Selain menganalisis akar dari konflik beserta transformasinya, dinamika konflik juga memperhatikan perkembangan konteks serta pengaruh upaya penyelesaian yang telah dilaksanakan terhadap konflik. Elemen-elemen dalam dinamika konflik ini meliputi (1) kejadian menentukan (*precipitating events*), (2) kemunculan, transformasi serta proliferasi isu, (3) polarisasi, (4) spiralisasi (*spiraling*) dan (5) pembentukan stereotipe dan *mirror-imaging*. Peta konflik serta sistematika dalam dinamika konflik telah digunakan oleh berbagai peneliti dalam studi konflik. Untuk penjelasan lebih mendalam lihat Paul Wehr, *Conflict regulation*, Westview, Boulder, 1979. Untuk penerapan sistematika ini, lihat publikasi yang dikeluarkan oleh International Crisis Group dan East-West Center.

kawasan.² Dari sebelas negara di kawasan ini, terdapat tiga negara ‘lama’³ yang secara terus menerus mengalami tantangan serupa.

Di Indonesia, konflik domestik kontemporer didominasi baik oleh konflik horizontal maupun vertikal. Konflik etnis dan agama terjadi di beberapa daerah seperti di Maluku, Sambas, dan Poso. Konflik vertikal berupa gerakan separatisme pernah dan sebagiannya masih bergaung di beberapa propinsi seperti di Nangroe Aceh Darussalam dan Papua. Pengalaman di masa lalu dengan Timor Leste merupakan pelajaran berharga bagaimana kesatuan dan persatuan negara masih mendapatkan tantangan dari pluralisme Indonesia.

Tidak jauh berbeda dari Indonesia, tantangan keamanan negara Malaysia datang dari konflik domestik kontemporer yang utamanya berupa konflik antar kaum, namun ditambah dengan konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik etnis di Malaysia pecah pada 13 Mei 1969, berhasil diredam oleh pemerintah sehingga kini, namun tetap menjadi bom waktu bagi kestabilan politik *consociationalism* Malaysia.⁴ Dua contoh kasus utama yang melibatkan sentimen etnis ialah insiden Kampung Medan pada tahun 2001 dan kasus HINDRAF pada tahun 2008. Selain itu, konflik etnis di Malaysia juga

² Secara global, perubahan karakteristik ini disampaikan oleh Boutros-Boutros Ghali pada tahun 1992, “*We have entered a time of global transition marked by uniquely contradictory trends. Regional and continental associations of States are evolving ways to deepen cooperation and ease some of the contentious characteristics of sovereign and nationalistic rivalries. National boundaries are blurred by advanced communications and global commerce, and by the decisions of States to yield some sovereign prerogatives to larger, common political associations. At the same time, however, fierce new assertions of nationalism and sovereignty spring up, and the cohesion of States is threatened by brutal ethnic, religious, social, cultural or linguistic strife.*” Boutros-boutros Ghali, *An Agenda for Peace: Preventive-diplomacy, peacemaking and peace-keeping*, Laporan Sekretaris Jenderal di depan Pertemuan Summit Dewan Keamanan PBB, 31 Januari 1992, <http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html> (diakses pada 9 Oktober 2011). Jika diamati dalam konteks kawasan Asia Tenggara terkini, konflik internasional yang masih berlaku di antaranya adalah konflik Thailand-Kamboja, konflik di Laut Cina Selatan dan konflik Indonesia-Malaysia. Sedangkan, konflik domestik baik itu etnis, agama maupun kepentingan berlaku di hampir setiap negara.

³ Peneliti menggunakan istilah ‘lama’ merujuk kepada usia kemerdekaan yang telah lebih dari 50 tahun. Bahkan, jika melihat sejarah resmi Thailand, maka negara ini merupakan satu-satunya negara bukan post-kolonialisme di Asia Tenggara.

⁴ Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai sejarah politik Malaysia secara umum, lihat John Funston, *Government and Politics in Southeast Asia*, ISEAS, Singapura, 2001.

rawan untuk kembali merebak akibat keberadaan gerakan-gerakan radikal baik terorisme secara umum maupun radikal Islam secara khusus. Di lain sisi, kestabilan domestik Malaysia juga mendapatkan tantangan melalui konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah yang mulai terbuka ke permukaan dengan insiden Bersih pada tahun 2007.

Sementara itu, konflik domestik kontemporer di Thailand yang secara utama melibatkan hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat juga memberikan dampak yang tidak jauh berbeda. Sebelum tahun 2006, konflik domestik di Thailand identik dengan konflik di Thailand Selatan. Konflik ini telah berlangsung lebih dari 200 tahun, menurun pada era tahun 1980an, namun kembali muncul dan meningkat secara signifikan sejak tahun 2004 pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra. Konflik etnis yang telah berlangsung lama ini (*protracted*) telah menjadi semakin kompleks sehingga telah menelan korban ribuan jiwa, baik warga Melayu, Budha maupun aparat pemerintahan.⁵ Di sisi lain, konflik di kawasan perbatasan ini secara kontinyu juga melibatkan warga, pemerintah dan wilayah Malaysia. Kemudian, pada tahun 2006 situasi di Bangkok memanaskan akibat ketegangan antara pro dan anti-Thaksin. Sejak itu, perhatian terhadap konflik di tiga negeri di selatan teralihkan kepada konflik di Bangkok tersebut.

BAB 2. PERUMUSAN MASALAH

Baik Indonesia, Malaysia dan Thailand telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi tekanan-tekanan domestik yang lahir tersebut. Dalam menyelesaikan konflik,

⁵ Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan jumlah sejak awal konflik sehingga kini, lihat Ahmad Omar Chapakia, *Politik Thai dan masyarakat Islam di Selatan Thailand*, Pustaka Darul Salam Sdn. Bhd & Rmi Multimedia Publishing, Kedah, 2000; Human Rights Watch, "Not enough graves: The war on drugs, HIV/AIDS, and violations of human rights in Thailand", 2004. <http://www.hrw.org/campaigns/aids/2004/thai.htm>; Duncan McCargo (ed). *Rethinking Thailand's southern violence*, NUS Press, Singapura, 2007.

pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru tidak hanya menerapkan berbagai doktrin seperti wawasan nusantara tetapi juga demokrasi terpimpin dengan pembangunan bersifat sentripetal. Pasca Orde Baru, berbagai kebijakan diterapkan dari yang sifatnya menekan seperti pemberlakuan Daerah Operasi Militer dan Sipil, sampai kepada yang sifatnya akomodatif seperti pemberian otonomi daerah. Sementara itu, pemerintah Malaysia masih mengandalkan kebijakan berorientasi pembangunan ekonomi (seperti *New Economy Policy/NEP*) dan *Internal Security Act (ISA)* dalam mengontrol perkembangan isu-isu sensitif yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban nasional. Sedangkan, pemerintah Thailand juga telah menerapkan berbagai pendekatan baik yang sifatnya menekan maupun akomodatif, bahkan tidak jarang melibatkan pihak Istana dalam menyelesaikan konflik di Thailand Selatan dan Bangkok.

Namun, konflik domestik ini masih muncul dan berkembang sehingga kini. Artinya, terdapat akar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak-pihak berkonflik. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mengenai dinamika konflik di ketiga negara tersebut untuk melihat sejauh mana transformasi masing-masing isu konflik dan konflik itu sendiri secara kontekstual. Lebih lanjut, terdapat ancaman yang sama terhadap keamanan nasional masing-masing negara yang berasal dari konflik domestik. Maka, penting untuk membandingkan konflik-konflik domestik di Indonesia, Malaysia dan Thailand secara kontekstual. Studi perbandingan terhadap ketiga negara ini dapat bermanfaat dalam menyusun alternatif penyelesaian konflik tidak hanya bagi kestabilan dan keamanan masing-masing negara, tetapi juga kawasan Asia Tenggara di masa depan.

BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA

Literatur dalam teori dan praktik konflik secara umum tersedia dalam jumlah yang memuaskan dan komprehensif.

Dalam menjelaskan konflik domestik di Indonesia, beberapa pandangan menjelaskan akar benturan-benturan horizontal dan vertikal. Toleransi atas perbedaan sosial dalam masyarakat majemuk seringkali mendapat tantangan awal yang bersifat alamiah dari masing-masing kelompok sosial—baik itu budaya, agama maupun politik. Tiap kelompok secara otomatis menerapkan perekat sosialnya sebagai ”perekat baru” dengan mempertahankan atau memaksakannya kepada kelompok lain (Simbolon, 1999). Budaya bertahan ini kemudiannya menyebabkan terpinggirkannya konsensus untuk kepentingan bersama (Tibi, 2001). Ditambah dengan sentralisasi pembangunan pada masa Orde Baru, muncul dua dimensi tuntutan dari kelompok yang merasa tertekan. Tuntutan yang pertama ditujukan kepada pemerintah pusat, tuntutan yang kedua ditujukan kepada kelompok-kelompok pendatang (Marzali, 2001). Hal ini pada kemudiannya menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal.

Untuk konflik domestik di Malaysia, literatur mengenai konflik domestik banyak ditemukan dalam literatur asing. Konflik domestik di Malaysia dapat ditelusuri kepada beberapa faktor. Yang pertama, terdapat tren baru mengenai militansi agama yang mengakibatkan Malaysia memasuki kondisi dimana toleransi dan akomodasi beragama telah kurang mendapat apresiasi ataupun diamalkan (Abdullah, 2004; Saravanamuttu, 2009). Faktor yang kedua adalah meskipun terdapat peningkatan pesat kekuatan Barisan Nasional (BN) dalam politik Malaysia, masih ada tantangan utama terhadap kekuasaan

BN di Sabah dan Serawak, serta dari dalam BN sendiri (Kian Ming, 2011) dan yang berasal dari masyarakat Malaysia yang mulai aktif dalam kehidupan politik Malaysia.

Konflik di Thailand Selatan adalah konflik yang paling kekal dan paling baik didokumenkan (Brown, 1988). Untuk konflik yang berlangsung sebelum era 1980-an, telah jelas bahwa akar permasalahan konflik terdapat pada diskriminasi agama dan budaya yang diiringi dengan tekanan fisik oleh pemerintah Bangkok terhadap masyarakat Muslim di wilayah Thailand Selatan. Sedangkan, untuk konflik yang kembali muncul pada tahun 2001, tiga pandangan utama hadir (Melvin, 2007). Pandangan pertama merujuk kepada sejarah gelap wilayah selatan ini (Nik Anuar Nik Mahmud, 1994, 1998, 2008; Chapakia, 2000). Perspektif kedua melihat bahwa aspek kekerasan dalam ajaran Islam. Sedangkan, perspektif yang ketiga fokus kepada konflik politik di Bangkok, terutama persaingan kekuasaan antara Thaksin dengan Istana, serta tragedi 9/11 sebagai akar konflik (McCargo, 2007; Mutebi, 2006).

BAB 4. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah;

1. Mengetahui akar permasalahan konflik-konflik domestik yang berlaku di Indonesia, Malaysia dan Thailand beserta transformasinya.
2. Menganalisis konteks serta kedinamikan konflik-konflik domestik tersebut.
3. Membandingkan kedinamikan konflik domestik yang mempengaruhi sumber konflik domestik di ketiga negara.

BAB 5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang metode pengumpulan datanya tidak melalui suatu prosedur statistik atau menggunakan bentuk-bentuk alat pengukuran lainnya (Strauss & Corbin, 1990). Metode ini memungkinkan analisis dinamika konflik dilakukan berdasarkan konteks konflik di masing-masing negara tanpa dibatasi oleh standar pengukuran tertentu. Untuk mendukung analisis dinamika konflik secara kontekstual, penelitian ini juga dengan sengaja tidak menggunakan satu pendekatan ataupun pemetaan khusus dalam studi konflik.

Data kualitatif maupun kuantitatif didapat melalui studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan menganalisis sejarah berdasarkan dokumen, jurnal, artikel, buku serta tesis mengenai konflik-konflik domestik di tiga negara. Peneliti tidak melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Dalam rangka menjaga penelitian ini dari kebiasaan, maka, peneliti akan menggunakan data yang tidak hanya dipublikasikan oleh pemerintah setempat maupun organisasi internasional, tetapi juga data-data yang dipublikasikan oleh para akademisi dan badan non-pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB 6. JADWAL PELAKSANAAN

BULAN KEGIATAN	NOV	DES	JAN	FEB	MARET	APRIL
PERSIAPAN						
PENGUMPULAN DATA & ANALISIS						
PENULISAN LAPORAN						

BAB 7. PERSONALIA PENELITIAN

Personalia yang terlibat dalam penelitian adalah mereka yang sesuai dengan bidangnya dan benar-benar dapat menyediakan waktu (diperhitungkan dengan beban tugas lain) untuk kegiatan penelitian ini, yang pada umumnya terdiri dari:

1. Ketua Peneliti

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| a. Nama Lengkap | : Dr. Denik Iswardani Witarti |
| b. Jenis Kelamin | : P |
| c. NIP | : 9910005 |
| d. Disiplin ilmu | : Hubungan Internasional |
| e. Pangkat/Golongan | : Lektor |
| f. Jabatan fungsional/struktural | : Kepala Riset dan Pengembangan FISIP |
| g. Fakultas/Jurusan | : FISIP/Prodi Hubungan Internasional |
| h. Waktu penelitian | : jam/minggu |

2. Anggota Peneliti

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. Nama Lengkap | : Tubagus Erif Fathurrohman, SIP, MIP, M.Si |
| b. Jenis Kelamin | : L |
| c. NIP | : 090038 |
| d. Disiplin ilmu | : Hubungan Internasional |
| e. Pangkat/Golongan | : |
| f. Jabatan fungsional/struktural | : Dosen Honorer |
| g. Fakultas/Jurusan | : FISIP/Prodi Hubungan Internasional |
| h. Waktu penelitian | : jam/minggu |

3. Anggota Peneliti

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| a. Nama Lengkap | : Tulus Yuniasih, M.Soc.Sc. |
| b. Jenis Kelamin | : P |
| c. NIP | : 110024 |
| d. Disiplin ilmu | : Hubungan Internasional |

- e. Pangkat/Golongan :
 f. Jabatan fungsional/struktural : Dosen Honorar
 g. Fakultas/Jurusan : FISIP/Prodi Hubungan Internasional
 h. Waktu penelitian : jam/minggu

Bab 8. Perkiraan Biaya Penelitian

Berikut adalah rincian biaya penelitian:

ITEM	DESKRIPSI	JUMLAH (IDR)
MATERI PENDUKUNG PENELITIAN	- Pembelian buku, dokumen dan materi lainnya - Fotokopi - Dokumentasi - ATK - Kertas - CD/DVD - Tape recorder - External disk - Film	Rp. 5.000.000
PENYUSUNAN LAPORAN	- Biaya Cetak - Penjilidan	Rp. 2.000.000
HONORARIUM	- Peneliti 3 orang	Rp. 6.000.000
LAIN-LAIN	- Korespondensi - Komunikasi	Rp. 3.000.000
TOTAL DANA PENELITIAN		Rp. 16.000.000

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, D. 1988. From peripheral communities to ethnic nations: separatism in Southeast Asia". *Pacific Affairs* 61(1): 51-77.
- Chapakia, A. O. 2000. *Politik Thai dan masyarakat Islam di Selatan Thailand*. Kedah: Pustaka Darul Salam Sdn. Bhd & Rmi Multimedia Publishing.
- Funston, J. 2001. Thailand: reform politics. Dlm. Funston, J. (ed.). *Government and politics in Southeast Asia*. Singapura: ISEAS.
- Kamarulnizam Abdullah. 2004. Islamic Militancy in Malaysia. Dlm. Trijono, L (ed.). *The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asia: Cases and Resolutions*, hal. 257-276. Yogyakarta: CSPS Books.
- Kian Ming, O. 2011. Malaysia in 2010: Resurgent Najib and BN, Stumbling Anwar and PR. Dlm. Singh, D (ed.). *Southeast Asian Affairs 2011*, hal. 131-157. Singapura: ISEAS.
- Marzali, A. 2001. Kekerasan Sosial di Kalimantan: Sebuah Analisis Antropologi Sosiokultural. *Analisis CSIS Tahun XXX/2001 No. 3*
- McCargo, D. 2007. Thaksin and the resurgence of violence in the Thai South. Dlm. McCargo, D. (ed.). *Rethinking Thailand's southern violence*, hal. 35-68. Singapura: NUS Press.
- Melvin, N. J. 2007. Conflict in Southern Thailand: islamism, violence and the state in the Patani insurgency. *SIPRI Policy Paper 20*.
- Mutebi, A. M. Thailand's independent agencies under Thaksin: relentless gridlock and uncertainty. Dlm. Singh, D. & Salazar, L. C. (ed.). *Southeast Asian affairs 2006*, hal. 303-324. Singapura: ISEAS.
- Nik Anuar Nik Mahmud. 1994. *The Malay unrest in South Thailand: an issue in Malayan-Thai border relations*. Bangi: ATMA, UKM.
- Nik Anuar Nik Mahmud. 1999. *Sejarah perjuangan Melayu Patani, 1785-1954*. Bangi: Penerbit UKM.
- Nik Anuar Nik Mahmud. 2008. *The Malays of Patani: the search for security dan independence*. Bangi: National University of Malaysia.
- Saravanamuttu, J. 2009. Malaysia: Political Transformation and Intrigue in an Election Year. Dlm. Singh, D (ed.). *Southeast Asian Affairs 2009*, hal. 173-194. Singapura: ISEAS.

Simbolon, C. 1999. Dampak Infiltrasi Budaya. Dlm. Wirahadikusumah, A. (ed.). *Indonesia Baru dan Tantangan TNI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Tibi, B. 2001. Krieg der Zivilizationen: Politik Und Religion Zwischen Vernunft und Fundamentalismus. Dlm. Bainus, A. Ancaman Disintegrasi Bangsa dan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, *Analisis CSIS Tahun XXX/2001* No. 3.

Wehr, P. 1979. *Conflict regulation*. Boulder: Westview.